

**AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA  
( Studi Kasus Di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu )**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
MARIANUS DENI JAPA  
2015210044**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG  
2020**

## **Ringkasan**

Transparansi yaitu keterbukaan suatu lembaga terhadap bawahannya dan tataran masyarakat sesuai program kerja yang dijalankan. Keterbukaan dimaksudkan tidak hanya pada dana yang alokasikan dan yang sudah dimanfaatkan melainkan capaian dalam setiap program yang akan disampaikan pada staf dan masyarakat umumnya.

Untuk mendapatkan *golls good governance* yaitu dibutuhkan keterbukaan pada pemerintah dalam menyampaikan berbagai macam hal pada masyarakat hingga dapat diterapkan dan dikomunikasikan ke pihak elemen.

### **Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Desa Beji**

Tingkat pengetahuan yaitu suatu prestasi atau keberhasilan mengenai kompotisasi dalam berbagai aspek. Keberhasilan yang diperoleh menjadi nilai yang mempunyai omset yang terletak pada setiap elemen yang mampu bersaing di berbagai bidang sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Tujuan utama pembangunan sumber daya manusia di kalangan adalah seiring perkembangan globalisasi masyarakat desa dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk pedesaan serta memperkuat kemandirian. bahwa upaya pemerintah Desa Beji dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia yaitu melakukan pendekatan secara individu dan sosialisasi akan pentingnya perkembangan sumber daya manusia bagi masyarakat Desa Beji. Upaya pemerintah desa Beji pun bukan hanya memberikan pendekatan bagi masyarakatnya tetapi memberikan modal usaha bagi masyarakatnya.

***Kata Kunci : Transparansi,Add,Good Governance,Pemerintah desa***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Transparansi yaitu keterbukaan suatu lembaga terhadap bawahannya dan tataran masyarakat sesuai program kerja yang dijalankan. Keterbukaan yang dimaksudkan tidak hanya pada dana yang alokasikan dan yang sudah dimanfaatkan melainkan capaian dalam setiap program yang akan disampaikan pada staf dan masyarakat umumnya.

Keberhasilan pemerintah dapat diukur dari semua program-program yang dijalankan sesuai dengan komitmen masyarakat dan pemerintah. Hal ini merupakan pemerintah desa. Hal ini merupakan pemerintah dapat melakukan sesuatu aktivitas yang penuh dengan loyalitas dan totalitas dalam melaksanakan sebuah regulasi, dan pemerintah lebih beragresif dalam menanggapi suatu persoalan secara universal yang kemudian dapat mengadvokasi persoalan-persoalan yang di keluhkan oleh masyarakat.

Sebuah lembaga dalam pengelolaan atau pelaksanaan kewenangan sesuai desentralisasi daerah dapat menjadi bagian sebagai konseptor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penggerak roda pemerintahan hingga dapat dikatakan *good governance*. Hal ini dalam pemerintahan dapat wewenang sesuai dengan koridor dan prosedural pemerintahan.

Sebagaimana instansi menginstruksikan proगतif pada pimpinan daerah sebagaimana teknis, dan konsep, dengan demikian dapat tercapai apa yang menjadi harapan bersama (Thomas, 2013:105-124).

Otonomi daerah ditujukan untuk menjadikan pemerintah sebagai fasilitator, serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersaing sebagaimana sesuai dengan aturan. Pemerintah dapat memunculkan suatu kebijakan atau inisiatif bagi masyarakat sehingga dapat diperhatikan sesuai dengan problematika yang terjadi di lapangan agar memikul tanggung jawab dan kepedulian yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan daerahnya. Secara struktural untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat dapat dilihat dari pemerintahan desa. Desa sebagai representasi bagi kabupaten sebagai penggerak dalam menjalankan suatu amanah otonomi daerah sesuai prosedural.

Keberlangsungan kesejahteraan pada masyarakat pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam melihat segala problematika yang terjadi di wilayah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah menjadi ujung tombak dalam pergerakan masyarakat. Pemerintah memunculkan suatu stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat.(Sofiyanto, 2016:63-76).

### **1.1. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan masalah dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transparansi pelaksanaan pembangunan pemerintah Desa di Desa Beji?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembangunan desa beji?

## **1.2.Tujuan Penelitian**

Tujuan uraian ini merupakan bisa menjelaskan,ADD dan transparansi pelaksanaan pembangunan

## **1.3.Manfaat Penelitian**

Dari uraian di atas maka peneliti mengharapkan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Karya ilmiah tersebut dapat bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkan sebagai peyumbang yang khususnya mengenai Akuntabilitas

### 2. Manfaat praktis

Berdasarkan obesrvasi peneliti menjadi sumbangsih dan bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam mengembangkan bidang yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico.2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui EGovernment*. Malang: Bayumedia Publising
- Astuty dan Fanida, 2011, *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Jawa Timur.
- Fajri, Setyowati, Siswidiyanto, 2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. Malang
- Ghazali,2001. *Akuntabilitas kinerja pemerintahan,Pengaruh Tidak Langsung Sistem Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Motivasi Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*. Vol II (1). Februari: 77-113.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin, 2007, “*Akuntansi Sektor Publik*”. Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irma, 2015, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*
- Mahmudi. 2010, *Akuntabilitas Pemerintah Dalam Mengelola Sumber Daya Cratakan 10*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntabilitas Publik Dalam Memberikan Amanah Kepada Penerima Amanah Dalam Pengelolaan ADD*. *Journal Pemerintah Daerah* Vol. 6 Tahun 2010. FIA.UB.
- Meleon. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta.
- Mubyartodan Bachrein. 2010. *Tipologi Desa Tertinggal Komoditas Basis Pertanian Dan Kegiatan Mayoritas Petani Provinsi Jawa Tengah*
- Nordiawan. 2009.*Akuntansi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pertanggungjawaban, Manajerial, Dan Pengawasan*. Pt Bhuana Ilmu Populer Jakarta.
- Nugroho. 2000.*Local Self Government*. Indeks Jakarta
- Ompi. 2012. *Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalm Penggunaan APBD Manado*. *Jurnal* vol III. No. 4 Tahun 2012.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Perundang-Undangan No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Rahmawati. 2012. Basis Kemajuan Sebuah Negara Ditentukan Oleh Kemajuan Desa. Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa. Vol.2. Tahun 2012. Bandung
- Rosalinda, 2014. Prioritas Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kebutuhan Masyarakat Dalam Penggunaan Anggaran. Vol. 4. Tahun 2014. UI
- Sofiyanto. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Alokasi Dana Desa, Grafindo Pesada Jakarta.
- Solekhan, 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Bogor.
- Solekhan. 2012. Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas Daerah Yang Lebih Baik Dengan Berlandaskan Good Governance. Bandung.
- Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.
- Subroto. 2009. Akuntabilitas Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Penerbit, Jenggala Pustaka Utama Surabaya.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Administrasi. Cetakan Ketiga. Penerbit, CV. Alva Beta. Jakarta
- Sujarweni. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Melalui Melalui Laporan Tertulis. Edisi Revisi Bumi Aksara. Jakarta
- Sulistiyani. 2004. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Maupun Penyelenggaraan Perusahaan. Kencana Prenada Media Grob. Jakarta.
- Thomas, 2013. Tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.
- Turner, Mark and Hulme, David. 1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Widiyanti. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

`Jawa Timur.